

ANALISIS DAMPAK ALTERNATIF PENGGOLONGAN WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN PADA KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Dwi Haryanto ¹⁾, Endrawati Fatimah ²⁾, Sri Yani Kusumastuti ³⁾

¹⁾ Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti; Badan Pusat Statistik
E-mail: haryanto@bps.go.id

²⁾ Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti
Email: indo_googolendra@yahoo.com

³⁾ Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Email: sriyanik@gmail.com

Abstrak

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang meliputi PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk memperlancar program tersebut, diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan lokasi dan kondisi wilayah sampai tingkat desa/kelurahan. Ketidaksiharian lokasi dan kondisi wilayah berakibat kurang tepatnya sasaran sehingga tujuan dari masing-masing program tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pertimbangan mendasar dalam pengalokasian anggaran PNPM Mandiri, serta memberikan alternatif agar pengalokasian anggaran PNPM Mandiri lebih sesuai dengan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis diskriminan, diketahui bahwa variabel TK, SMP, rumah tangga listrik, pasar, SMU, pertokoan, rumah sakit, dan rumah tangga telepon merupakan variabel pembentuk kriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan wilayah perkotaan. Dengan diperolehnya 8 variabel tersebut, maka 3 kriteria pembentuk wilayah perkotaan (jumlah kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses fasilitas perkotaan) dapat dijadikan pembeda dalam pembentukan wilayah perkotaan dan perdesaan. Perubahan jumlah variabel pada kriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan mempengaruhi perubahan wilayah perkotaan di Indonesia. Perubahan wilayah menjadi penting untuk dipertimbangkan agar pengalokasian anggaran PNPM Mandiri lebih tepat sasaran.

Kata kunci: PNPM, perkotaan, perdesaan, alokasi anggaran

Pendahuluan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 telah ditetapkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro jobs*, dan *pro poor*. Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan semakin banyaknya kesempatan kerja sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat terlepas dari perangkap kemiskinan. Pada tahun 2007, hingga 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia berturut-turut berkisar 37 juta jiwa (17%), 35 juta jiwa (15%), 33 juta jiwa (14%), 31 juta jiwa (13%), dan 30 juta jiwa (12%). Seiring dengan banyaknya program penanggulangan kemiskinan, RPJMN memberikan target adanya penurunan kemiskinan hingga tahun 2014. Pada RPJMN 2010-2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi diharapkan pada kisaran 6,3% hingga 6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8% hingga 10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5% hingga 6%.

Kemiskinan di Indonesia tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang hidup di perkotaan dan perdesaan. Akar permasalahan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah perdesaan dan pertanian. Area kemiskinan masih dominan di wilayah perdesaan atau secara khusus pada sektor pertanian. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan hal tersebut. Dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri meliputi PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya pembedaan nama dalam program PNPM Mandiri ini diharapkan telah sesuai dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang harus memperhatikan karakteristik kemiskinan di Indonesia dan tidak terlepas dari pola hidup masyarakatnya yang meliputi masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Untuk memperlancar program PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan berdasarkan tujuannya masing-masing diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan lokasi dan kondisi wilayah sampai tingkat desa/kelurahan. Ketidaksesuaian lokasi dan kondisi wilayah akan berakibat kurang tepatnya sasaran sehingga tujuan dari masing-masing program tidak tercapai. Dengan memperhatikan alokasi anggaran yang direncanakan, Provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan. Seluruh wilayah di ibukota negara Republik Indonesia ini memperoleh alokasi anggaran PNPM Mandiri Perkotaan. Padahal Provinsi DKI Jakarta meliputi 5 kotamadya dan 1 kabupaten. Berdasar pada kewilayahan, alokasi anggaran PNPM Mandiri Provinsi DKI Jakarta tidak seharusnya memperoleh anggaran PNPM Mandiri perkotaan semua, melainkan terbagi dalam anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di provinsi lain di Indonesia. Dari kacamata perencanaan keuangan negara/daerah, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian bahkan perlu dilakukan peninjauan terhadap kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan sehingga alokasi anggaran PNPM Mandiri untuk seluruh provinsi di Indonesia menjadi lebih tepat sasaran, sesuai dengan wilayah dan karakteristiknya.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan yang sesuai untuk pengalokasian anggaran PNPM Mandiri yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan mendasar dalam pengalokasian anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan?
2. Bagaimana alternatifnya supaya pengalokasian dana BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan?

Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi dan merumuskan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan yang sesuai, sebagai pertimbangan mendasar dalam pengalokasian anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan.
2. Memberikan alternatif yang dapat ditawarkan agar pengalokasian dana BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan menjadi lebih sesuai dengan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan.

Studi Pustaka

Pada dasarnya pola kehidupan masyarakat yang ada seringkali disebutkan dalam dua karakteristik yaitu pola hidup masyarakat perkotaan dan perdesaan. Menurut Suparlan (2002), pencirian wilayah perkotaan telah diidentifikasi bahwa kota adalah suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur mata pencaharian non agraris dan tata guna lahan yang

beraneka ragam, serta dengan pergedungan yang berdirinya berdekatan. Bauman dalam Hidayah (2011) berpendapat bahwa pencirian desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama, sebanyak-banyaknya beberapa ribu orang yang hampir semuanya saling mengenal. Mata pencaharian utama penduduk perdesaan adalah bertani, berternak, perikanan, buruh serta usaha-usaha yang sangat dipengaruhi hukum alam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada pasal 1 diantaranya menyebutkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan dengan mendasarkan pada 2 pendekatan yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan memperbesar akses berusaha khususnya kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Deepa Narayan (2002) memberikan pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan dan penguatan aset dan potensi masyarakat miskin agar mampu berpartisipasi dalam mengendalikan dan memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemajuan dan kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni: (1) PNPM Inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, mencakup PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. (2) PNPM-Penguatan terdiri dari program program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu.

PNPM-Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri. Sementara itu, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di perdesaan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian terhadap kriteria-kriteria penggolongan wilayah perkotaan dan perdesaan memberikan hipotesis bahwa variabel-variabel kepadatan penduduk, persentase jumlah rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses fasilitas perkotaan dapat dijadikan pembeda dalam penggolongan wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Perubahan basis kewilayahan memberikan hipotesis bahwa perubahan penggolongan wilayah perkotaan mengakibatkan perubahan pada pengalokasian anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan yang dapat memberikan indikasi awal belum tepatnya pengalokasian anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan.

Metodologi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Informasi yang digunakan penelitian ini adalah data primer hasil sensus potensi desa di seluruh

Indonesia dan data sekunder pengalokasian anggaran PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan dalam kurun waktu tahun 2010-2012. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi TK, SMP, rumah tangga listrik, pasar, SMU, pertokoan, rumah sakit, rumah tangga telepon, bioskop, hotel/bilyar/diskotek/panti pijat/salon, rumah tangga, dan rumah sakit

Metode analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan, yaitu suatu bagian dari teknik analisis statistik peubah ganda yang bertujuan untuk memeriksa ketepatan pengelompokan yang sudah terbentuk dengan cara membentuk fungsi diskriminan (Supranto, 2010). Pemeriksaan ini didasarkan pada peubah-peubah yang secara substansi/teori berkaitan dengan pengelompokan tersebut. Menurut Johnson dan Winchern (2002) tujuan dari analisis diskriminan adalah untuk menggambarkan ciri-ciri suatu pengamatan dari bermacam-macam populasi yang diketahui, baik secara grafis, maupun aljabar dengan membentuk fungsi diskriminan. Menurut Hair et.al (2006) terdapat dua metode penghitungan yang dapat digunakan dalam pembentukan fungsi diskriminan, yaitu metode simultan (simultaneous method) yang lebih dikenal dengan metode enter dan metode bertatar (stepwise method). Metode simultan merupakan penghitungan fungsi diskriminan dimana semua peubah bebas dipertimbangkan secara bersama-sama. Sedangkan metode bertatar digunakan untuk melihat peubah bebas yang paling berarti (peubah bebas yang dapat diikutsertakan dalam pembentukan fungsi diskriminan), yang dapat dilakukan dengan dua kriteria, yaitu: peubah bebas yang memiliki F terbesar dan peubah bebas yang memiliki nilai Wilk's Lambda terkecil.

Pembentukan fungsi diskriminan dalam penulisan ini menggunakan metode bertatar. Fungsi diskriminan mempunyai bentuk umum berupa persamaan linier yaitu:

$$\hat{Y} = \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_n X_n$$

Keterangan: \hat{Y} = skor diskriminan

X_1, X_2, \dots, X_n = peubah bebas

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ = koefisien estimasi

Setelah diperoleh hasil analisis diskriminan maka perlu dilakukan penghitungan kontribusi masing-masing variabel penjelas terhadap variabel respon dan kemudian disimulasikan dalam analisis diskriminan untuk masing-masing variabel yang diperlakukan. Bila hasil simulasi telah diperoleh maka dilakukan simulasi terhadap pengalokasian anggaran PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan dalam kurun waktu pelaksanaan. Dengan demikian terdapat 2 jenis simulasi yang dilakukan yaitu simulasi variabel-variabel pembentuk wilayah perkotaan dan simulasi pengalokasian anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan. Dari hasil simulasi tersebut dilakukan analisis hasil simulasi yang kemudian dilengkapi dengan kesimpulan dan berbagai rekomendasi.

Hasil dan Pembahasan

Dari analisis diskriminan dengan menguji beda rata-rata antara wilayah perkotaan dan perdesaan diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan analisis diskriminan juga diperoleh informasi bahwa kriteria kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses fasilitas perkotaan dapat dijadikan pembeda dalam penggolongan wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketiga kriteria tersebut secara nyata signifikan sebagai pembentuk wilayah perkotaan. Untuk melihat adanya perbedaan wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan bantuan program SPSS diperoleh pada Tabel 1.

Tabel 1. Besaran nilai Wilks' Lambda

Fungsi yang diujikan	Wilks' Lambda	Chi-square	Derajat bebas	signifikansi
1	0,378	74043,102	3	0,000

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 1 tersebut kriteria kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses fasilitas perkotaan dapat dijadikan pembeda dalam penggolongan wilayah perkotaan dan perdesaan dengan signifikansi kurang dari 5 persen. Koefisien-koefisien pembentuk fungsi diskriminan dapat diperoleh juga dengan bantuan program SPSS pada Tabel 2.

Kekuatan fungsi diskriminan terlihat dari indikator korelasi kanonik, nilai akar ciri, dan group centroid. Keakurasian fungsi terlihat dari besarnya hit ratio yang nilainya lebih besar dari 1,25 prior probability. Dari hasil pengklasifikasian, jumlah wilayah perkotaan yang awalnya sebesar 15.770 menurun menjadi 13.271 wilayah perkotaan. Dengan demikian telah terjadi perbedaan klasifikasi setelah dilakukan analisis diskriminan. Dengan adanya perubahan penggolongan wilayah perkotaan akan mengakibatkan perubahan alokasi anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2. Koefisien-koefisien Fungsi Diskriminan dari Kriteria Terpilih

No.	Kriteria	Koefisien
1	Akses 10 variabel	0,292
2	Kepadatan penduduk	0,325
3	Rumah tangga pertanian	0,369
4	Konstanta	-2,214

Sumber: data diolah

Meskipun analisis diskriminan telah menunjukkan hasil yang signifikan, dipandang perlu memperhatikan kontribusi variabel-variabel pembentuk kriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan. Hal ini dilakukan karena beberapa variabel diduga sudah kurang relevan dengan kondisi sekarang. Dari kontribusi variabel-variabel pembentuk kriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan diperoleh informasi bahwa dari 42,20% kontribusi kriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan variabel-variabel pembentuk kriteria tersebut memberikan rata-rata kontribusi berurutan mulai dari yang tertinggi adalah keberadaan/akses ke TK (10,72%), SMP (9,55%), rumah tangga listrik (7,24%), pasar (4,82%), SMU (4,07%), pertokoan (2,61%), rumah sakit (1,64%), rumah tangga telepon (0,95%), hotel/bilyar/diskotek/panti pijat/salon (0,37%), dan bioskop (0,27%).

Memperhatikan besaran kontribusi yang ada perlu dilakukan penyesuaian terhadap variabel-variabel yang memiliki kontribusi kecil. Untuk itu dilakukan simulasi dengan menghilangkan 4 variabel yang memiliki kontribusi kecil, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghilangkan variabel bioskop
- b. Menghilangkan variabel hotel/bilyar/diskotek/panti pijat/salon

- c. Menghilangkan variabel rumah tangga
- d. Menghilangkan variabel rumah sakit

Tabel 3. Koefisien-koefisien Fungsi Diskriminan dari Kriteria Terpilih

No.	Kriteria	Koefisien
1	Kepadatan penduduk	0,336
2	Rumah tangga pertanian	0,384
3	Akses 8 variabel	0,304
4	Konstanta	-2,273

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil simulasi yang menghilangkan 4 variabel tersebut, maka 8 variabel (TK, SMP, rumah tangga listrik, pasar, SMU, pertokoan, rumah sakit, dan rumah tangga telepon) sebagai variabel pembentuk kriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan yang mendukung kriteria kepadatan penduduk dan jumlah rumah tangga pertanian dalam pembentukan wilayah perkotaan. Koefisien-koefisien pembentuk fungsi diskriminan diperoleh dengan bantuan program SPSS ditunjukkan pada Tabel 3.

Dari Tabel 3, maka fungsi diskriminan yang terbentuk:

$$Y = -2,273 + 0,336X_1 + 0,384X_2 + 0,304X_3 \quad (1)$$

dimana: X_1 = kepadatan penduduk,

X_2 = jumlah rumah tangga pertanian,

X_3 =keberadaan/akses fasilitas perkotaan (10 variabel).

Dengan adanya perubahan fungsi diskriminan yang terbentuk maka penggolongan wilayah perkotaan mengalami perubahan jumlah wilayah perkotaan dan perdesaan. Perubahan menunjukkan bahwa ternyata seluruh provinsi mengalami pergeseran wilayah perkotaan dengan keragaman yang bervariasi.

Terjadi perubahan jumlah wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 2.108 wilayah. Dari jumlah tersebut rata-rata terjadi perubahan sebesar 64 wilayah di setiap provinsi. Dari perubahan wilayah perkotaan yang terjadi, seluruh provinsi mengalami penurunan wilayah perkotaan. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar yaitu berkurangnya wilayah perkotaan sebesar 404 wilayah, 368 wilayah, dan 225 wilayah.

Perubahan wilayah akibat dari penyesuaian variabel kriteria pembentuk wilayah perkotaan berdampak pada penyesuaian alokasi anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan. Perkiraan alokasi anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan yang telah dilakukan penyesuaian pada tahun 2010 sebesar Rp11,23 trilyun dengan komposisi Rp1,18 trilyun untuk BLM PNPM Mandiri perkotaan dan Rp10,05 trilyun untuk BLM PNPM Mandiri perdesaan. Seluruh provinsi mengalami penyesuaian alokasi BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan, seiring dengan adanya perubahan klasifikasi perkotaan dan perdesaan.

Tabel 4. Perubahan Alokasi Anggaran BLM awal dan BLM penyesuaian, Tahun 2010-2012

Tahun	BLM awal (juta rupiah)	BLM penyesuaian (juta rupiah)	Perubahan (juta rupiah)	Persentase
2010	11.042.175	11.231.334	189.159	1,71
2011	9.452.835	9.585.066	132.231	1,40
2012	9.434.836	9.526.300	91.464	0,97

Sumber data: <http://www.pnpm-mandiri.org/>, diolah

Sebaran perubahan alokasi anggaran BLM di Indonesia terjadi di semua provinsi. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2010, dengan rata-rata perubahan di setiap provinsi mencapai Rp5,7 milyar. Pada tahun 2011 rata-rata perubahan sebesar Rp4,0 milyar per provinsi dan pada tahun 2012 rata-rata perubahan sebesar Rp2,8 milyar per provinsi.

Pengalokasian anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan yang relatif menurun dalam 3 tahun terakhir berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan yang pada tahun 2010, 2011, dan 2012 tercatat secara berurutan sebesar 31 juta jiwa, 30 juta jiwa, dan 29 juta jiwa. Memperhatikan menurunnya angka kemiskinan dalam 3 tahun terakhir, secara bersamaan pada 3 tahun tersebut PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan mulai mengemuka. Oleh pemerintah program tersebut dipandang cukup berhasil, meskipun masih ada komentar-komentar yang menyebutkan bahwa PNPM Mandiri kurang sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dari analisis diskriminan mengenai penggolongan wilayah perkotaan dan perdesaan menyebutkan bahwa variabel pembentuk wilayah perkotaan sudah tepat, namun perlu memperhatikan perkembangan pola hidup masyarakat.

Penggolongan wilayah memegang peranan yang penting dalam pengalokasian quota anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan karena penggolongan wilayah mendasari sebaran besaran quota anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan. Dalam perencanaannya alokasi anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi telah di quotakan dan kemudian direalisasikan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh kelembagaan pada masyarakat. Masyarakat harus mandiri dalam mengembangkan potensinya sehingga mampu mengangkat derajatnya dari kemiskinan. Bila pemerintah telah mendeklarasikan bahwa PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan dinilai telah berhasil dalam program penanggulangan kemiskinan maka dengan adanya perubahan penggolongan wilayah perkotaan dan perdesaan memberikan kesempatan adanya perubahan quota sebaran anggaran BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan sehingga komentar-komentar yang menyebutkan bahwa alokasi BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan tidak sesuai sasaran dapat diminimalisir. Dari hasil simulasi pada 3 tahun terakhir terlihat bahwa quota BLM PNPM Mandiri harusnya lebih besar dari quota yang ada saat ini. Selanjutnya bila quota telah ditetapkan kelembagaan masyarakat harus terus ditingkatkan peranannya, mengingat besarnya peluang "oknum-oknum" yang tidak bertanggungjawab dapat "memanfaatkan" anggaran yang ada.

Komposisi quota BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan dalam 3 tahun terakhir berdasar hasil penyesuaian masing-masing disebutkan bahwa pada tahun 2010 komposisi BLM PNPM Mandiri perkotaan memperoleh 35,77 persen, sedangkan BLM PNPM Mandiri perkotaan memperoleh 64,23 persen. Pada tahun 2011 komposisi quota BLM PNPM Mandiri perkotaan mencapai 36,80 persen dan quota BLM PNPM Mandiri perdesaan mencapai 63,20 persen. Sedangkan pada tahun 2012 komposisi quota BLM PNPM Mandiri perkotaan mencapai 36,55 persen dan quota BLM PNPM Mandiri perdesaan mencapai 63,45 persen. Dari komposisi tersebut sesungguhnya berdasarkan penggolongan wilayah yang telah disesuaikan komposisi quota BLM PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan dalam 3 tahun terakhir relatif stabil berkisar di angka 35-37 persen untuk quota BLM PNPM Mandiri perkotaan dan berkisar di angka 63-65 persen untuk quota BLM PNPM Mandiri perdesaan.

Bila memperhatikan perubahan penggolongan wilayah yang telah disesuaikan, maka penggolongan wilayah ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang berbasis kewilayahan baik kegiatan berskala nasional maupun kegiatan berskala regional. Hal ini menjadi penting dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota agar keakurasian target/sasaran kegiatan menjadi lebih presisi. Bila perencanaan awal sudah presisi diharapkan akan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program-program yang berbasis kewilayahan, sehingga perencanaan anggaran keuangan negara/daerah menjadi lebih bermanfaat dan tidak mubazir.

Kesimpulan

1. Kriteria kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses fasilitas perkotaan dapat dijadikan pembeda yang nyata dalam pembentukan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
2. Diperoleh 2 variabel (bioskop dan hotel/ bilyar/diskotek/panti pijat/salon) yang memiliki kontribusi terendah dihilangkan/tidak digunakan sebagai variabel yang mendukung kriteria pembentuk keberadaan/akses fasilitas perkotaan.
3. Seluruh provinsi mengalami pergeseran wilayah perkotaan menjadi perdesaan, berdampak pada perubahan pengalokasian anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan yang memberikan indikasi awal kekurangsesuaian dalam pengalokasian anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan pada tingkat perencanaan.
4. Pengalokasian anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan yang berbasis kewilayahan menjadikan penggolongan wilayah perkotaan dan perdesaan penting pada tingkat perencanaan alokasi anggaran, karena kekurangsesuaian lokasi mengakibatkan kurang tepatnya sasaran yang berdampak pada ketidakefektifan program PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan dan dapat memberikan ruang penyalahgunaan dalam pemanfaatan anggaran PNPM Mandiri.
5. Secara statistik perubahan pengalokasian anggaran BLM PNPM Mandiri setelah dan sebelum penyesuaian berbeda signifikan pada taraf alfa 5 persen, baik menyeluruh maupun setiap tahunnya.

Saran

Dari simpulan hasil penelitian yang telah diperoleh beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Variabel-Variabel pembentuk wilayah perkotaan harus diperbaharui disesuaikan dengan kondisi terkini, minimal dalam kurun waktu 10 tahunan mengingat cukup cepatnya perkembangan/pembangunan wilayah di Indonesia.

- 2) Basis kewilayahan memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya pada program penanggulangan kemiskinan tapi juga pada program-program pembangunan pemerintah lainnya karena basis tersebut menunjukkan realita masyarakat Indonesia sehingga berbagai analisis pembangunan harus memperhatikan basis ini.
- 3) Dalam perencanaan keuangan negara/daerah harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat di tanah air pada tahapan implementasi anggaran yang telah direncanakan, baik di tingkat nasional maupun regional karena ketepatan rencana memberikan keakurasian yang signifikan pada sasaran.
- 4) Keakurasian pada sasaran akan mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang akan "memanfaatkan" program PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan, namun demikian tetap harus diwaspadai sehingga anggaran PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan yang telah teralokasikan tidak mubazir.
- 5) Kelembagaan pengelola PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan harus lebih ditingkatkan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun di tingkat kecamatan agar pelaksanaan program PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan menjadi lebih baik dan lebih mantap.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2010, *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014*.
- Budiyono, Agus, 2010, Dampak Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Semarang, IKIP PGRI.
- Department Of Economic And Social Affairs, 2008, *Principles And Recommendations For Population And Housing Censuses Revision 2*, New York, United Nations.
- Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Hair, et. al., 2006, *Multivariate Data Analysis 6th Edition*, Pearson International Edition.
- Hidayah, Nurul, 2011, Kesiapan Psikologis Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Menghadapi Diversifikasi Pangan Pokok, *Humanitas*, Vol. VIII No.1 Januari 2011.
- Johnson, A Richard, 2002, *Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th Edition*, Pearson Prentice Hall.
- Mubarak, Zaki, 2010, Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Narayan, Deepa, 2002, *Empowerment and Poverty Reduction: A Source book*, Washington DC: The World Bank.